

**DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN /RAHASIA**  
**KELURAHAN BAMBU APUS KECAMATAN CIPAYUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

NO	NAMA/KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	JANGKA WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PENTING BAGI PUBLIK	
				JIKA DIBUKA	JIKA DITUTUP
1	Informasi data bantuan social dan data keluarga miskin	Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Data Penerima Bantuan Sosial	Tidak Terbatas kecuali ada izin dari instansi terkait	Tidak terjaga privasi dan keamanan data individu sehingga menyebabkan penipuan dan penyalahgunaan data	Menjaga data privasi dan keamanan individu serta mencegah terjadinya penipuan dan penyalahgunaan data
2	Perencanaan dan pelaksanaan Keuangan dan Anggaran Kelurahan	Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (2) : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan azas keterbukaan, kemandirian dan tanggung jawab serta kerahasiaan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 28 ayat (1) Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan secara tertutup. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006	Tidak Terbatas kecuali ada izin dari instansi terkait	Tujuan perencanaan pembangunan di kelurahan yang tidak berkelanjutan dan tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan dapat menimbulkan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Potensi penyalahgunaan dana</li> <li>- Gangguan program pembangunan</li> <li>- Hilangnya kepercayaan masyarakat</li> <li>- Kerugian keuangan</li> <li>- Gangguan keamanan</li> <li>- Penghambat proses perencanaan</li> <li>- Potensi pelanggaran hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencegah pelanggaran informasi pribadi</li> <li>- Mencegah informasi rincian rekening bank yang hanya boleh diketahui oleh instansi tertentu</li> <li>- Mendukung perencanaan keuangan yang bersifat rencana strategis wilayah</li> <li>- Menghindar penyalahgunaan informasi</li> <li>- Mencegah persaingan tidak sehat saat pelaksanaan anggaran</li> </ul>

		tentang Pengelolaan Keuangan Daerah				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjamin efisiensi pengelolaan keuangan</li> <li>- Membangun keunggulan strategis</li> <li>- Mengamankan proyek strategis yang belum diumumkan</li> </ul>
3	Rincian HPS	Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Adanya persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menghasilkan penyedia dan pemenang tender yang berkualitas dan kompeten	5 tahun	
4	Surat ahli waris	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf g	Tidak terbatas	Jika dibuka dapat mengungkapkan isi fakta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat seseorang	Jika ditutup dapat melindungi data pribadi	
5	Identitas ASN	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf g	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 42 ayat (1) menyatakan bahwa setiap informasi mengenai korban kekerasan dalam rumah tangga harus dirahasiakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Privasi korban terjaga</li> <li>- Mendukung pemulihan psikologis bagi korban dan keluarga</li> <li>- Menjaga stigma social</li> <li>- Mempermudah proses hukum</li> <li>- Tidak terjadi konsekuensi hukum</li> <li>- Tidak terjadi kerugian institusi atau organisasi</li> </ul>	Jika ditutup dapat melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	
6	Penilaian ASN (Dokumen Penilaian Kinerja/SKP)	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf l	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencegah pelanggaran informasi pribadi</li> </ul>	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	

7	Informasi terkait persandian (user, password, coding)	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<p>pasal 18 ayat (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan azas keterbukaan, kemandirian dan tanggung jawab serta kerahasiaan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Menimbulkan keresahan atau ketidakpercayaan masyarakat</p>	<p>- Menghindari penyalahgunaan informasi</p>	Jika ditutup , melindungi kepercayaan masyarakat
---	---	--	--	---	--

Jakarta, Februari 2024

Lurah Kelurahan Bambu Apus,  
  
 Noviani Wijanarko, ST, MM  
 NIP. 197411302010011007